



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR
32 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ende Nomor 32 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 perlu diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 32 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;

Paraf		

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

Paraf		
		

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

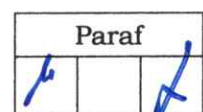
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2024.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 32 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 130)



diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

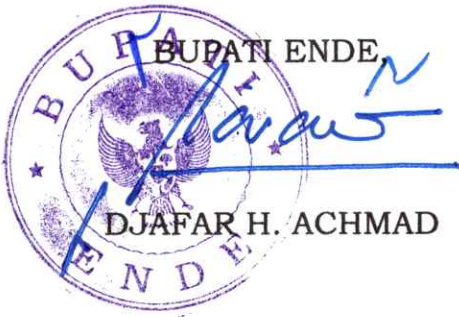
2. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Lampiran Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 34) dan Peraturan Bupati Ende Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

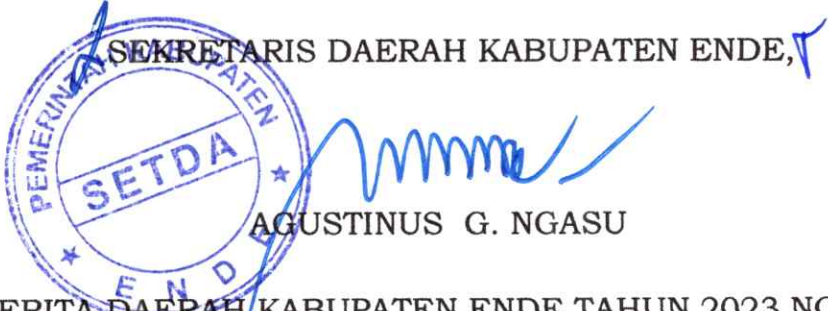
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal, 21 Juli 2023



Diundangkan di Ende
pada tanggal 21 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR 18

Paraf		
/		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2019-2024

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}$	BPS OPD Terkait	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah adalah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Formulasi Penghitungan: $RLS = \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^n x_i$ Keterangan : RLS : Rata-rata Lama Sekolah Xi : lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas n : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	BPS OPD Terkait	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Formulasi Penghitungan: $HLS_t^i = FK \times \sum_{l=0}^n \frac{E_l^i}{P_l^i}$ Keterangan : HLS_t^i : Harapan Lama Sekolah FK : Faktor koreksi pesantren E_l^i : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_l^i : Penduduk usia i pada tahun t	BPS OPD Terkait	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Umur Harapan Hidup diperoleh dari hasil perhitungan Jumlah Umur masing-masing yang meninggal pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut.	BPS OPD Terkait	Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Umur Harapan Hidup diperoleh dari hasil perhitungan Jumlah Umur masing-masing yang meninggal pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut.	BPS OPD Terkait	Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Meningkatnya kualitas perekonomian Kabupaten Ende	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Formulasi Penghitungan:	BPS OPD Terkait	Dinas Pariwisata Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			$G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan : G_t : Pertumbuhan ekonomi periode t PDB_t : Produk Domestik Bruto t (berdasarkan harga konstan) PDB_{t-1} : Produk Domestik Bruto periode sebelumnya		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3.1 Meningkatkan daya saing pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB (akomodasi dan makanan)}} \times 100\%$	BPS OPD Terkait	Dinas Pariwisata
	3.2 Meningkatkan daya saing sektor unggulan (industri pengolahan) dan sektor potensial (perdagangan, transportasi dan pergudangan)	Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB	Kontribusi sektor unggulan merupakan kontribusi dari sektor industri pengolahan. Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah kontribusi dari sektor unggulan (industri pengolahan)}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	BPS OPD Terkait	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.3 Meningkatkan investasi	Kontribusi sektor potensial terhadap PDRB	Kontribusi dari sektor potensial merupakan kontribusi sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan) Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah kontribusi dari sektor potensial}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	BPS OPD Terkait	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Laju pertumbuhan investasi		Keterangan : RI_n : Realisasi investasi pada tahun n RI_{n-1} : Realisasi investasi pada tahun sebelumnya (n-1) $\frac{RI_n - RI_{n-1}}{RI_{n-1}} \times 100\%$	Rekapitulasi realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	3.4 Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor dominan dan penunjang pangan utama	Kontribusi sektor pertanian, kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi dari sektor pertanian, kelautan dan perikanan $\frac{\text{Jumlah PDRB}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	BPS OPD Terkait	Dinas Pertanian Dinas Perikanan
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan	Hasil survey konsumsi pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Percentage penduduk miskin	Formulasi Penghitungan: <i>Head Count Index</i> (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Formulasi Penghitungan : $P_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$ Keterangan : a : 0 z : Garis kemiskinan y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ... q) y_i < z q : Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n : Jumlah penduduk	BPS OPD Terkait	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	3.5 Menurunnya tingkat gangguan	Tingkat gangguan terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{usia angkatan kerja}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	BPS OPD Terkait	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3.6 Meningkatnya pengendalian inflasi	Laju Inflasi	Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang sering kali dihubungkan saat terjadi sebuah inflasi atau deflasi. Menurut penjelasan dari BPS atau Badan Pusat Statistik, IHK merupakan sebuah indikator yang dipakai untuk mengetahui tingkat inflasi di sebuah negara. Formulasi Penghitungan: $CPI_t = \frac{C_t}{C_0} \times 100\%$ Keterangan : CPI _t : Indeks Harga Konsumen pada periode tertentu C _t : Biaya keranjang belanja pada periode berjalan C ₀ : Biaya keranjang belanja pada periode dasar	BPS OPD Terkait	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
	3.7 Meningkatnya kualitas pelayanan sosial	Indeks Pelayanan Sosial	Indeks pelayanan sosial merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga komponen penyusun, yaitu PSKS yang diberdayakan, PPKS yang tertangani, dan Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota.	OPD Terkait	Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Meningkatnya kualitas ketersediaan infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan sembilan komponen, yaitu: 1. Kondisi mantap jalan Kabupaten 2. Drainase yang berfungsi dengan baik 3. Terbangunnya Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Perumukiman 4. Luas sawah beririgasi	OPD Terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			5. Proporsi Rumah tangga yang terakses Air Minum 6. Jalan lingkungan dalam kondisi baik 7. KK dengan Rumah Layak Huni 8. Rumah tinggal bersantasi 9. Luas kawasan kumuh tertangani		
	4.1 Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi yang ramah lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan sembilan komponen, yaitu: 1. Kondisi mantap jalan Kabupaten 2. Drainase yang berfungsi dengan baik 3. Terbangunnya Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Perumahan 4. Luas sawah bertirigasi 5. Proporsi Rumah tangga yang terakses Air Minum 6. Jalan lingkungan dalam kondisi baik 7. KK dengan Rumah Layak Huni 8. Rumah tinggal bersantasi 9. Luas kawasan kumuh tertangani	OPD Terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Formulasi Penghitungan: $IDM = \frac{1}{3} (IKS + IKE + IKL)$ Keterangan : IDM : Indeks Desa Membangun IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Data IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan
	4.2 Meningkatkan pemerataan pembangunan kawasan perdesaan	Tingkat Kemandirian Desa • Desa Mandiri • Desa Maju	Jumlah Desa berdasarkan dengan kategori desa pada tahun n	Data IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		• Desa Berkenbang • Desa Tertinggal • Desa Sangat Tertinggal		dan Transmigrasi	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Formulasi Penghitungan: $IKLH = (30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$ Keterangan : IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKU : Indeks Kualitas Air IKA : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
	4.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Formulasi Penghitungan: $IKLH = (30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$ Keterangan : IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKU : Indeks Kualitas Air IKA : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian dan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
					Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.1 Meningkatkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien		Opini BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Laporan Hasil Opini BPK	Inspektorat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai/Predikat AKIP	Nilai/predikat hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Nilai LPPD	Hasil Nilai LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	Hasil penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	Inspektorat Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
		Indeks Merit System	Nilai atas penerapan sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara	Hasil penilaian atas penerapan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks SPBE	Nilai indeks atas penilaian SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan publik	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
6.	Meningkatnya rasa aman tertib dan nyaman bagi pengembangan usaha dan kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun } n}{\text{Jumlah penduduk pada tahun } n} \times 100\%$	BPS Data penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja
	6.1 Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat	Angka Kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun } n}{\text{Jumlah penduduk pada tahun } n} \times 100\%$	BPS Data penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja
	6.2 Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.	BPS OPD Terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.	BPS OPD Terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1.	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Keterangan : RLS : Rata-rata Lama Sekolah X_i : lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas n : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas $RLS = \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^n x_i$	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Harapan Lama Sekolah	Keterangan : $HL S_n^t$: Harapan Lama Sekolah FK : Faktor koreksi pesantren E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t : Penduduk usia i pada tahun t $HL S_n^t = FK \times \sum_{i=1}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.1 Meningkatkan kualitas peserta didik	Rata-rata Nilai Kompetensi Peserta Didik	Rata-rata nilai kompetensi peserta didik merupakan rata-rata dari nilai kemampuan literasi dan numerasi peserta didik tingkat SD dan SMP Formulasi Penghitungan : Rata-rata nilai kompetensi peserta didik SD+ rata-rata nilai kompetensi peserta didik SMP $\frac{\text{Jumlah siswa usia 3-6 tahun yang duduk di PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 3-6 tahun}} \times 100\%$	Rekapitulasi hasil rapor pendidikan SD dan SMP	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
	1.2 Meningkatkan aksesibilitas PAUD	APK jenjang PAUD	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah S1}}{\text{Jumlah guru seluruhnya}} \times 100\%$	Dapodik dan data kependudukan	Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
	1.3 Meningkatkan kualitas guru	Persentase guru berijazah S1	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah S1}}{\text{Jumlah guru seluruhnya}} \times 100\%$	Dapodik	Bidang Pembinaan Ketenagaan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan Pelestarian Terhadap Budaya Lokal	Persentase Cagar Budaya dan Nilai Budaya Lokal yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya dan nilai budaya lokal yang dilestarikan}}{\text{Jumlah keseluruhan cagar budaya dan nilai budaya lokal}} \times 100\%$	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.1 Meningkatkan Pelestarian terhadap Budaya Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah kebudayaan lokal yang terdaftar}}{\text{Jumlah kebudayaan lokal yang terdaftar}} \times 100\%$	Buku dengan judul Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan
			Budaya Lokal yang dimaksud adalah Tradisi Lisan, Adat Istiadat, RITUS, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Kesenian, Bahasa Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional dan Cagar Budaya		
3	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
2. DINAS KESEHATAN					
1	Masyarakat Ende sehat	Usia Harapan Hidup	Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup.	BPS	Dinas Kesehatan
			Umur Harapan Hidup diperoleh dari hasil perhitungan Jumlah Umur masing-masing yang meninggal pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut.		
	1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan indikator SPM Bidang Kesehatan	Cakupan indikator SPM Bidang Kesehatan merupakan komposit dari dua belas indikator SPM, dengan cara penghitungan rata-rata capaian persentase dua belas indikator SPM bidang kesehatan.	Data capaian indikator SPM bidang kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Persentase penurunan stunting	Keterangan : BS_n : Jumlah Balita stunting pada tahun n BS_{n-1} : Jumlah Balita stunting pada tahun sebelumnya $\frac{BS_n - BS_{n-1}}{BS_{n-1}} \times 100\%$	Data Balita stunting	Bidang Kesehatan Masyarakat
	1.2 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin	Cakupan fasilitas kesehatan terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi}}{\text{Jumlah keseluruhan fasilitas kesehatan}} \times 100\%$	Data fasilitas kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin	Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin diukur dari kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah masyarakat miskin yang menerima pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah masyarakat miskin}} \times 100\%$	Data masyarakat miskin Rekapitulasi kunjungan pasien	Bidang Pelayanan Kesehatan
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kesehatan
	2.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Meningkatnya pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar dalam kerangka membangun desa menata kota	Indeks Pembangunan Infrastruktur ke-PUan	Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan enam komponen, yaitu:	Data hasil realisasi indeks komposit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1. Kondisi mantap jalan Kabupaten 2. Drainase yang berfungsi dengan baik		

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			3. Terbangunnya Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Permukiman 4. Luas sawah beririgasi 5. Proporsi Rumah tangga yang terakses Air Minum 6. Jalan lingkungan dalam kondisi baik		
	1.1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase terbangunnya Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Permukiman	Terbangunnya turap/talud bronjong yang meliputi Wilayah Jalan Penghubung, tembok penyokong tanah di daerah pemukiman dan bronjongnisasi di daerah rawan longsor. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Luas lokasi yang terbangun turap}}{\text{Luas kawasan rawan longsor}} \times 100\%$	Data pembangunan turap	Bidang Pengairan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
		Persentase luas sawah beririgasi	Luas sawah beririgasi dalam kondisi baik meliputi daerah irigasi yang teraliri air yang cukup untuk dua kali masa panen dalam setahun Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Total luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	Data luas irigasi	Bidang Pengairan
	1.2 Meningkatkan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Proporsi Rumah tangga yang terakses Air Minum	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga terakses air minum}}{\text{Jumlah keseluruhan Rumah Tangga}} \times 100\%$	Data Rumah Tangga terakses air minum	Bidang Air Bersih
	1.3 Meningkatnya kualitas drainase	Persentase Drainase yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Panjang drainase yang berfungsi dengan baik}}{\text{Total panjang drainase seluruhnya}} \times 100\%$	Data Drainase	Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
	1.4 Meningkatkan kualitas jalan lingkungan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan lingkungan seluruhnya}} \times 100\%$	Data jalan lingkungan	Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
	1.5 Meningkatkan kualitas jalan kabupaten	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	Data Jalan Kabupaten	Bidang Bina Marga

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	1.6 Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang meliputi urusan pembangunan infrastruktur, rumah, tempat usaha, pengurusan sertifikat tanah, pinjaman bank dengan jaminan tanah, maka kesesuaian ruang akan dikeluarkan berdasarkan peraturan RTRW, RDTR dan Pola Ruang yang ditindaklanjuti dengan pengendalian serta pengawasan terhadap kesesuaian ruang yang sudah dikeluarkan. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah Ketaatan RTRW dan RDTR}}{\text{Jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan}} \times 100\%$	Data RTRW, RDTR	Bidang Penataan Ruang
	1.7 Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan	Ruang Terbuka Hijau publik adalah 20% dari luas wilayah kota Ende yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah adalah 1,40% yaitu Taman dalam Kota Ende Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah RTH publik yang berada di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$	Data RTH publik	Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendeayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendeayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pekterjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat Bidang Survey Pengendalian dan Bina Program

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
4. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					
1	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Dasar dalam Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Ramah Lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu: 1. Rumah tinggal bersantiasi 2. Kepala Keluarga dengan rumah layak huni 3. Luas kawasan kumuh tertangani	Data Rumah Tinggal Data Kawasan Kumuh Data Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.1	Meningkatnya Rumah Tinggal Bersantiasi layak	Persentase rumah tinggal bersantiasi layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal bersantiasi layak pada tahun } n}{\text{Jumlah rumah tinggal bersantiasi seluruhnya pada tahun } n} \times 100\%$	Data rumah tinggal dan data rumah tinggal bersantiasi	Bidang Kawasan Permukiman
1.2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase kepala keluarga dengan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah KK yang memperoleh rumah layak huni pada tahun } n}{\text{Jumlah KK seluruhnya pada tahun } n} \times 100\%$	Data Rumah Layak Huni Data Kepala Keluarga	Bidang Perumahan
1.3	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Persentase luas kawasan kumuh tertangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh tertangani}}{\text{Jumlah seluruh luasan kawasan permukiman kumuh pada tahun } n} \times 100\%$	Data Luas Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman
1.4	Meeningkatnya Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah	Presentase Bidang Tanah Pemda Yang Tersertifikat	$\frac{\text{Luas Bidang Tanah Pemda yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah aset tanah milik Pemda seluruhnya}} \times 100\%$	Data asset tanah milik Pemda	Bidang Pertanahan
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	2.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah	Angka Kriminalitas	Jumlah kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun n $\frac{\text{Jumlah penduduk pada tahun } n}{\text{Jumlah penduduk pada tahun } n} \times 100\%$	BPS	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1 Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah	1.1 Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah	Persentase penurunan kasus K3	Keterangan : $\frac{K3_n - K3_{n-1}}{K3_{n-1}} \times 100\%$ $K3_n$: Jumlah Kasus K3 pada tahun n $K3_{n-1}$: Jumlah kasus K3 pada tahun sebelumnya	Data Kasus K3	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakan $\frac{\text{Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ada}}{\text{Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ada}} \times 100\%$	Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bidang Penegakan Produk Hukum
1.2 Meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	1.2 Meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase penurunan kasus kebakaran	Keterangan : $\frac{\text{Bakar}_n - \text{Bakar}_{n-1}}{\text{Bakar}_{n-1}} \times 100\%$ Bakar$_n$: Jumlah kasus kebakaran pada tahun n Bakar$_{n-1}$: Jumlah kasus kebakaran pada tahun sebelumnya	Data kasus kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran
		Tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah 15 menit sejak laporan kebakaran diterima, dengan rincian persiapan kendaraan dan pertengkapan pemadam kebakaran 5 menit, perjalanan ke lokasi 5 menit, dan memadamkan api 5 menit, dengan radius jarak maksimal 7 km.	Data kasus kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			Formula Penghitungan : Realisasi tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK) $\frac{\text{Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)}}{\text{sesuai standar}}$ x 100%		
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Satuan Polisi Pamong Praja
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
6. DINAS SOSIAL					
1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi PPKS	Indeks Pelayanan Sosial	Indeks pelayanan sosial merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga komponen penyusun, yaitu PSKS yang diberdayakan, PPKS yang tertangani, dan Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota.	Data PSKS dan PPKS	Dinas Sosial
	1.1 Meningkatnya perlindungan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.	Data PPKS	Bidang Penanganan Fakir Miskin Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Formula Penghitungan :		

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			$\frac{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh PPKS}} \times 100\%$		
	1.2 Meningkatkan peran PSKS dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Formula Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah seluruh PSKS}} \times 100\%$	Data PSKS	Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Sosial	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
7. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
1.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	BPS	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	1.1 Meningkatkan kesempatan kerja	Besaran pencari kerja bersertifikat yang mendapatkan pekerjaan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja bersertifikat yang mendapatkan pekerjaan}}{\text{Jumlah pencari kerja bersertifikat}} \times 100\%$	Data Pencari Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
					dan Pengawasan Tenaga Kerja
	1.2 Meningkatkan pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase peningkatan kawasan transmigrasi	$\frac{\text{Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan}}{\text{Luas kawasan transmigrasi yang direncanakan}} \times 100\%$	Data Kawasan Transmigrasi	Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
8. DINAS KETAHANAN PANGAN					
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Hasil survey konsumsi pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	1.1 Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan	Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Total produksi (Ton EB)}}{\text{Total kebutuhan (Ton EB)}} \times 100\%$	Data Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	1.2 Meningkatkan pengankekaragaman dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Hasil survey konsumsi pangan	Bidang Konsumsi dan Pengankekaragaman Pangan Bidang Keamanan Pangan
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Dinas Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				Reformasi Birokrasi	
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH=(30% x IKU)+(30% x IKA)+(40% x IKTL) Keterangan : IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKU : Indeks Kualitas Air IKA : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
1.1 Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Keterangan : IP_j : Indeks pencemaran bagi peruntukan j C_i : Konsentrasi parameter kualitas air i L_{ij} : Konsentrasi parameter kualitas air I yang tercantum dalam baku peruntukan air j M : Maksimum R : Rerata $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Parameter pengukuran menggunakan NO₂ dan SO₂, dengan rumus penghitungan sebagai berikut : $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$ $I_{gu} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ Sehingga formula penghitungan IKU	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan	

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Indeks Kualitas Lahan	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{gu} - 0,1) \right)$	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan
	1.2 Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan	Persentase pengelolaan sampah	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ $\frac{\text{Volume sampah yang dikelola}}{\text{Volume timbunan sampah}} \times 100\%$	Data pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Lingkungan Hidup
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Dokumen survey kepuasan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	SI/AK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efesien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
11. DIMAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Mencapai penduduk tumbuh seimbang dalam upaya pengendalian angka kelahiran	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR) merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Formulasi Penghitungan : $ASFR_i = \frac{bi}{pif} \times K$ Keterangan : bi : Jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia ke-i i : Kelompok usia pif : Jumlah wanita kelompok usia ke-i	Laporan dari PKB/PLKB Data Kelahiran Data Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.1 Mencapai penduduk tumbuh seimbang dalam upaya pengendalian angka kelahiran	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR) merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Formulasi Penghitungan : $ASFR_i = \frac{bi}{pif} \times K$ Keterangan : bi : Jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia ke-i i : Kelompok usia pif : Jumlah wanita kelompok usia ke-i	Laporan dari PKB/PLKB Data Kelahiran Data Penduduk	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	1.2 Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (<i>Contraceptive Prevalence Rate/ CPR</i>)	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>Contraceptive Prevalence Rate/ CPR</i>)	Pemakaian kontrasepsi ((<i>Contraceptive Prevalence Rate/ CPR</i>) terhadap proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/ PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	Laporan Pelayanan Kontrasepsi	Bidang Pengendalian Penduduk
	1.3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Pengukuran kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) terhadap wanita kawin 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	Laporan Pelayanan Kontrasepsi	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Membangun Desa (IDM)	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan	Data IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			Formulasi Penghitungan: $IDM = \frac{1}{3} (IS \times IE \times IL)$ Keterangan : IDM : Indeks Desa Membangun IS : Indeks Ketahanan Sosial IE : Indeks Ketahanan Ekonomi IL : Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	dan Transmigrasi	
	1.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun (IDM) - Desa Mandiri - Desa Maju - Desa Berkembang - Desa Tertinggal - Desa Sangat Tertinggal	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Formulasi Penghitungan: $IDM = \frac{1}{3} (IS \times IE \times IL)$ Keterangan : IDM : Indeks Desa Membangun IS : Indeks Ketahanan Sosial IE : Indeks Ketahanan Ekonomi IL : Indeks Ketahanan Lingkungan	Data IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Gotong Royong Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
	1.2 Meningkatkan desa yang naik kelas	Persentase desa yang naik kelas	Rata-rata persentase Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang naik kelas. Formulasi Penghitungan: - Jumlah Desa Berkembang yang memenuhi kriteria Desa Maju pertahun berdasarkan IDM pertahun / Jumlah Desa Berkembang (perawal tahun n) x 100% - Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang pertahun berdasarkan IDM pertahun / Jumlah Desa Tertinggal (perawal tahun n) x 100 % - Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memenuhi	Data IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Gotong Royong Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			kriteria Desa Tertinggal per tahun berdasarkan IDM pertahun / Jumlah Desa Sangat Tertinggal (perawal tahun n) x 100 %		
	1.3 Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif adalah : Wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif}}{\text{Jumlah seluruh Lembaga Kemasyarakatan Desa}} \times 100\%$	Laporan Bidang	Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Gotong Royong Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efesien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
13. DIMAS PERHUBUNGAN					
1.	Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) Keterangan: IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yg dilayani pada Kabupaten Ende x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten Ende). IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) =	Laporan bobot angkutan jalan, bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			(jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten Ende x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut)		
1.1 Meningkatkan konektivitas transportasi	Persentase peningkatan layanan angkutan umum	Persentase peningkatan transportasi laut	Jumlah layanan angkutan umum di kabupaten yang memiliki izin trayek pada tahun n $\frac{\text{Jumlah angkutan umum di kabupaten yang beroperasi}}{\text{Jumlah moda transportasi laut di perairan kabupaten yang beroperasi}} \times 100\%$	Dokumen Tataan Transportasi Lokal Dokumen Izin Trayek/Kartu Pengawasan Dokumen Angkutan Umum	Bidang Perhubungan Darat Bidang Perhubungan Udara Bidang Penataan Sistem Perhubungan
			Jumlah moda transportasi laut di perairan kabupaten yang memiliki izin $\frac{\text{Jumlah moda transportasi laut di perairan kabupaten yang beroperasi}}{\text{Jumlah moda transportasi laut di perairan kabupaten yang beroperasi}} \times 100\%$	Dokumen Kapal Dokumen Izin Usaha Pelayaran Rakyat	Bidang Perhubungan Laut
			Peningkatan sarana prasarana transportasi dilaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan). Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan di kabupaten}}{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan di kabupaten yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan monitoring fasilitas perlengkapan jalan	Bidang Perhubungan Darat
1.2 Meningkatkan fasilitas transportasi	Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi darat	Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi laut	Peningkatan sarana prasarana transportasi laut meliputi pemeliharaan dermaga rakyat dan fasilitas pendukung lainnya (pos jaga, radio komunikasi dan lain-lain) Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana transportasi laut yang memenuhi standar regulasi}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana transportasi laut yang ada}} \times 100\%$	Dokumen dermaga	Bidang Perhubungan Laut

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhubungan
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Meningkatnya penetapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Rata-rata nilai domain SPBE	Laporan hasil SPE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.1 Meningkatkan penetapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Perhitungan Indeks SPBE berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator SPBE mengacu Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE menggunakan skala 4 yang meliputi 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator.	Laporan hasil SPE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bidang Layanan Elektronik Government Bidang teknologi Informasi Bidang Informasi Komunikasi Publik
	1.2 Meningkatkan jangkauan akses dan penguatan sinyal internet di Kabupaten Ende	Cakupan jangkauan akses dan penguatan sinyal internet di Kabupaten Ende	Jumlah desa di Kabupaten Endeyang terjangkau akses dan penguatan sinyal internet. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah desa yang terakses internet / penguatan sinyal}}{\text{Total jumlah desa}} \times 100\%$	Laporan Bidang	Bid. Teknologi Informasi Komunikasi
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
15. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	Persentase koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Ende}} \times 100\%$	Data Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase UKM mandiri	$\frac{\text{Jumlah UKM yang mandiri}}{\text{Jumlah UKM yang ada di Kabupaten Ende}} \times 100\%$	Data UKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase koperasi aktif	Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Ende}} \times 100\%$	Laporan Koperasi	Bidang Perijinan dan Kelembagaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Koperasi
		Persentase koperasi berbadan hukum	$\frac{\text{Jumlah koperasi berbadan hukum}}{\text{Jumlah seluruh pra koperasi di kabupaten Ende}} \times 100\%$	Laporan Koperasi Berbadan Hukum	Bidang Perijinan dan Kelembagaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Koperasi
	1.2 Meningkatnya UKM yang naik kelas	Persentase UKM yang naik kelas	Kriteria UKM Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah kekayaan bersih lebih dari 50juta s.d. 500juta dan hasil penjualan tahunan lebih dari 500juta s.d. 2,5milyar. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah UKM yang naik kelas}}{\text{Jumlah UKM yang terdaftar}} \times 100\%$	Data UKM	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	1.3 Meningkatnya digitalisasi pada UKM	Persentase UKM yang menggunakan teknologi berbasis digital	UKM yang menggunakan platform digital dan marketplace. Formula Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah UKM yang telah menggunakan teknologi berbasis digital}}{\text{Jumlah UKM yang terdaftar}} \times 100\%$	Data UKM	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah serta penyebaran data dan informasi potensi peluang investasi melalui berbagai kegiatan promosi yang menarik minat para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Ende	Porsentase kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah untuk menarik minat para investor			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1.1 Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal	Peningkatan nilai realisasi penanaman modal Formula Perhitungan :	Jumlah investasi tahun ini dan tahun sebelumnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			$\frac{\text{Realisasi penanaman modal tahun } n - \text{Realisasi penanaman modal tahun } n-1}{\text{Realisasi penanaman modal tahun } n-1} \times 100\%$		
	1.2 Terwujudnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
1	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai hasil instrumen pengukuran tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sepanjang hayat oleh Perpustakaan Nasional.	Laporan hasil publikasi IPLM oleh Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1.1 Meningkatnya tingkat literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai hasil instrumen pengukuran tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sepanjang hayat oleh Perpustakaan Nasional. Formula Penghitungan : Nilai Hasil IPLM oleh Perpustakaan Nasional	Laporan hasil publikasi IPLM oleh Perpustakaan Nasional	Bidang Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya pengawasan kearsipan	Indeks Pengawasan Kearsipan	Nilai hasil dalam pengawasan sistem kearsipan internal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia	Laporan hasil publikasi Indeks Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	2.1 Meningkatkan pengawasan kearsipan	Indeks Pengawasan Kearsipan	Aspek Penilaian dalam pengawasan sistim kearsipan internal meliputi : • Pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan Arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip • Sumber daya manusia Kearsipan, meliputi sumber daya manusia kearsipan dan prasarana dan sarana Formula Penghitungan : Nilai Hasil Pengawasan Arsip oleh Arsip Nasional RI	Laporan hasil publikasi Indeks Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia	Bidang Pembinaan Kearsipan dan Layanan Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan Bidang Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis
	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	3.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
18. DINAS PERIKANAN					
1	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Persentase peningkatan produktifitas perikanan tangkap	$\frac{PPT_n - PPT_{n-1}}{PPT_{n-1}} \times 100\%$ Keterangan : PPT_n : Jumlah produktifitas perikanan tangkap pada tahun n	Data hasil produktifitas perikanan tangkap	Dinas Perikanan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Persentase peningkatan produktifitas perikanan budidaya	$PPT_{n-1} : \frac{\text{Jumlah produktifitas perikanan tangkap pada tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah produktifitas perikanan tangkap pada tahun n}} \times 100\%$ Keterangan : PPB_n : Jumlah produktifitas perikanan budidaya pada tahun n PPB_{n-1} : Jumlah produktifitas perikanan tangkap pada tahun sebelumnya (n-1)	Data hasil produktifitas perikanan budidaya	Dinas Perikanan
	1.1 Meningkatkan produksi perikanan	Persentase produksi ikan tangkap	Produksi ikan tangkap meliputi produksi perikanan di perairan bebas (laut, danau, sungai), baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan, dimana volume produksi ikan tangkap dihitung dalam berat basah ikan hasil tangkapan. Formulasi Penghitungan : $\text{Produksi perikanan tangkap tahun n (ton)} \times 100\%$ $\text{Potensi lestari perikanan tangkap (ton)}$	One Data Statistik Perikanan Tangkap	Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap Bidang Pembinaan Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Kecil
		Persentase produksi ikan budidaya	Produksi ikan budidaya meliputi ikan, udang dan lain-lain yang dipanen dari tempat pemeliharaan (tambak, kolam, empang) baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan dimana volume produksi dihitung dalam berat basah ikan hasil pembudidayaan. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Total produksi perikanan budidaya tahun n (ton)}}{\text{Target produksi perikanan budidaya (ton)}} \times 100\%$	One Data Statistik Perikanan Budidaya	Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat

19. DINAS PARIWISATA

1	Meningkatkan daya saing pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun } n}{\text{Pendapatan Asli Daerah tahun } n} \times 100\%$	Data Pendapatan sektor pariwisata	Dinas Pariwisata
	1.1 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Ende	Persentase jumlah kenaikan kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } (n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } (n-1)} \times 100\%$	Data Kunjungan Wisatawan Lokal dan Mancanegara pada Destinasi Tujuan Wisata di Ende	Bidang Promosi
	1.2 Meningkatnya lama tinggal wisatawan (<i>length of stay</i>)	Rata-rata lama tinggal wisatawan	$\frac{\text{Jumlah hari lama tinggal wisatawan}}{\text{Jumlah wisatawan}}$	Data Tamu (Wisatawan) dari Hotel/Penginapan	Bidang Destinasi Bidang Industri Bidang Kelembagaan

2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pariwisata
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Pariwisata	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat

20. DINAS PERTANIAN

1	Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor pertanian}}{\text{PDRB}} \times 100\%$	BPS	Dinas Pertanian
---	--	---	--	-----	-----------------

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	1.1 Meningkatkan produktivitas pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura	Cakupan Nilai produktivitas Tanaman Pangan	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan (ton)}}{\text{Luas areal panen tanaman pangan (Ha)}}$	Data Statistik Dinas Pertanian	Bidang Tanaman Pangan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Cakupan nilai produktivitas tanaman hortikultura	$\frac{\text{Produksi Hortikultura (ton)}}{\text{Luas areal panen hortikultura (Ha)}}$	Data Statistik Dinas Pertanian	Bidang Hortikultura Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	1.2 Meningkatkan produksi pertanian sektor tanaman perkebunan dan peternakan	Cakupan nilai produksi tanaman perkebunan	$\frac{\text{Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)}}{\text{tahun n-Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton) tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	Data Statistik Dinas Pertanian	Bidang Perkebunan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2		Cakupan nilai produksi peternakan	$\frac{\text{Jumlah produksi daging hasil ternak (Kg) tahun n-Jumlah produksi daging hasil ternak (Kg) tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah produksi daging hasil ternak (Kg) tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	Data Statistik Dinas Pertanian	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pertanian
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Pertanian	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP	Sekretariat

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	

21. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1	Meningkatnya daya saing sektor unggulan (industri pengolahan) dan sektor potensial (perdagangan, transportasi dan pergudangan)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Kontribusi sektor perdagangan}}{\text{PDRB}} \times 100\%$	BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Kontribusi sektor industri}}{\text{PDRB}} \times 100\%$	BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
1.1	Meningkatnya daya saing sektor industri	Persentase peningkatan pendapatan IKM yang dibina	Pengertian IKM yang dibina adalah IKM yang telah menerima bantuan, pelatihan, penyuluhan serta dilakukan monitoring dan IKM saat mengurus perijinan. IKM yang menerima bantuan modal, pendapatan dihitung berdasarkan IKM yang aktif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 setelah dilakukan pembinaan. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Total pendapatan IKM setelah dibina}-\text{Total pendapatan IKM sebelum dibina}}{\text{Total pendapatan IKM sebelum dibina}} \times 100\%$	Data Rekapitulasi Pendapatan IKM	Bidang Industri
1.2	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase pelaku usaha yang tertib ukur dan tertib niaga	Tertib ukur adalah pelaku usaha yang memiliki alat UTTTP yang suda ditera/ tera ulang. Tertib niaga adalah pelaku usaha pemilik kios/took/swalayan yang menjual Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang tidak melewati masa kadaluwarsa dan berstandar SNL. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah realisasi pelaku usaha yang tertib ukur dan tertib niaga tahun n}}{\text{Jumlah target pelaku usaha yang tertib ukur dan tertib niaga tahun n}} \times 100\%$	Data rekapitulasi pemilik, pengguna, pemegang alat UTTTP (PBUTTTP). Data rekapitulasi Pelaku Usaha (pemilik took/kios/ swalayan)	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
1.3	Meningkatnya sektor perdagangan komoditi unggulan daerah	Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Komoditi Unggulan	Komoditi Unggulan Daerah yang masuk dalam Perdagangan Antar Pulau (PAP) : Kopra, Kemiri, Kopi, Kakao, Jambu Mete, Cengkeh, Kelapa .	Data Komoditi Unggulan	Bidang Perdagangan

NO	TTUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Daerah	Formulasi Penghidungan : Nilai Komoditi Tahun n - Nilai Komoditi Tahun n-1 Nilai Komoditi Tahun n-1 x 100%		
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
22. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda yang berkualitas dalam pembangunan	Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam kejuaraan tingkat provinsi dan nasional Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	Jumlah cabang olahraga yang memperoleh mendali pada tahun n dikurangi jumlah cabang olahraga yang memperoleh mendali pada tahun n-1 Jumlah cabang olahraga yang memperoleh mendali pada tahun n-1 x 100% Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	Data Akhir Perolehan Mendali Data Anggota Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bidang Olahraga
1.1	Meningkatnya prestasi olahraga dalam	Persentase cabang olahraga yang	Jumlah cabang olahraga (cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat daerah dan provinsi) yang	Data Perolehan Mendali	Bidang Olahraga

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	kejuaraan tingkat provinsi dan nasional	memperoleh medali	memperoleh medali pada tahun n Formula Penghitungannya : $\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang memperoleh medali}}{\text{Jumlah cabang olahraga yang diikuti}} \times 100\%$		
	1.2 Meningkatkan keaktifan organisasi pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Organisasi pemuda yang aktif adalah organisasi pemuda yang telah terdaftar dan berbadan hukum yang melakukan kegiatan sampai sekarang secara rutin. Formula Penghitungannya : $\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah organisasi pemuda secara keseluruhan}} \times 100\%$	Data Organisasi Kepemudaan	Bidang Kepemudaan
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
23. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	1.1 Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani pada tahun } n \text{ dikurangi Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani pada tahun } n-1}{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani pada tahun } n-1} \times 100\%$	Laporan Hasil Penelusuran Kasus (Aplikasi Simpori)	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	1.2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadaan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Formulasi Penghitungan $\frac{\text{IPM perempuan yang berpartisipasi politik dan ekonomi}}{\text{IPM laki-laki yang berpartisipasi politik dan ekonomi}} \times 100\%$	BPS	Bidang Kualitas Hidup Perempuan
	1.3 Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
24. SEKRETARIAT DAERAH					
1	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai LPPD	Hasil Nilai LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	Hasil penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah
		Indeks SPBE	Nilai indeks atas penilaian SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan publik	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik	Sekretariat Daerah
		Penyampaian LPPD Pemerintah Daerah tepat waktu	Penyampaian LPPD tepat waktu melalui aplikasi ELPPD	Surat Penyampaian LPPD tepat waktu dari Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
		Penyampaian Laporan SPM Pemerintah Daerah tepat waktu	Penyampain SPM tepat waktu melalui aplikasi	Surat Penyampaian SPM tepat waktu dari Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
1.1	Meningkatnya pembinaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak lainnya	$\frac{\text{Jumlah kerja sama yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah kerja sama yang direncanakan}} \times 100\%$	Dokumen Rekapitulasi Perjanjian Kerja sama	Bagian Pemerintahan
		Persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	$\frac{\text{Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah seluruh produk hukum daerah yang dihasilkan}} \times 100\%$	Data Produk Hukum	Bagian Hukum
		Persentase produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	$\frac{\text{Jumlah seluruh produk hukum daerah yang ditetapkan}}{\text{Jumlah seluruh produk hukum daerah yang diusulkan}} \times 100\%$	Data produk Hukum	Bagian Hukum

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Persentase fasilitasi bantuan hukum	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang ditangani}} \times 100\%$	Data Kasus	Bagian Hukum
		Persentase terlaksananya pengajuan administrasi (hibah dan bansos) yang tepat dan akurat	$\frac{\text{Jumlah pengajuan administrasi atas hibah dan bansos yang selesai dan sesuai dnegan ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah total pengajuan administrasi atas hibah dan bansos}} \times 100\%$	Dokumen Rekapitulasi Hibah dan Bantuan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Hasil penilaian perhitungan indeks tata kelola oleh LKPP	Dokumen hasil penilaian LKPP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Kabupaten Ende sesuai target anggaran	$\frac{\text{Total realisasi penyerapan keuangan fisik program/kegiatan perangkat daerah}}{\text{Total anggaran dan target fisik program/kegiatan perangkat daerah}} \times 100\%$	Dokumen Rekapitulasi Realisasi APBD	Bagian Administrasi Pembangunan
		Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman	Laporan hasil evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman	Bagian Organisasi
		Indeks Pelayanan Publik	Hasil penilaian pelayanan publik dari Deputy Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dokumen hasil penilaian pelayanan publik dari Deputy Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan	Hasil survey atas pelayanan kepada pimpinan	Dokumen hasil survey atas pelayanan kepada pimpinan	Bagian Umum Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	Meningkatnya pengendalian inflasi	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang sering kali dihubungkan saat terjadi sebuah inflasi atau deflasi. Menurut penjelasan dari	BPS Data Koordinasi dengan Dinas	Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			BPS atau Badan Pusat Statistik, IHK merupakan sebuah indikator yang dipakai untuk mengetahui tingkat inflasi di sebuah negara. Formulasi Penghitungan: $CPI_t = \frac{C_t}{C_0} \times 100\%$ Keterangan : CPI_t : Indeks Harga Konsumen pada periode tertentu C_t : Biaya keranjang belanja pada periode berjalan C_0 : Biaya keranjang belanja pada periode dasar	Perdagangan dan Perindustrian	
	2.1 Meningkatkan pembinaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Jumlah kajian perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah kajian perekonomian dan sumber daya alam pada tahun n	Dokumen Kajian Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
	3.1 Meningkatkan pembinaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan predikat AKIP B	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan predikat AKIP B}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Laporan hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	Bagian Organisasi
	3.2 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP	Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	

25. SEKRETARIAT DPRD

1	Meningkatnya pelayanan kepada lembaga DPRD Kabupaten Ende	Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD	Hasil survey kepuasan layanan kepada Lembaga DPRD.	Dokumen hasil survey kepuasan layanan kepada lembaga DPRD	Sekretariat DPRD
1.1	Meningkatkan layanan hak-hak keuangan dan administrasi	Persentase capaian layanan hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD	$\frac{\text{Jumlah capaian indikator terkait layanan hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD}}{\text{Jumlah indikator terkait layanan hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD}} \times 100\%$	Rekapitulasi Data Capaian Indikator terkait Layanan Hak-hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Bagian Umum dan Keuangan
1.2	Meningkatnya layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD Kabupaten Ende	Persentase capaian layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD Kabupaten Ende	$\frac{\text{Jumlah capaian indikator layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD}}{\text{Jumlah indikator terkait layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD}} \times 100\%$	Rekapitulasi Data Capaian Indikator terkait layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Bagian Fasilitas, Penganggaran dan Pengawasan
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Sekretariat Dewan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Bagian Umum dan Keuangan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
26. INSPEKTORAT DAERAH					
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	Opini BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Laporan Hasil Opini BPK	Inspektorat Daerah
1.1	Meningkatnya sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintah desa	Persentase tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dan APIP	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi temuan hasil pengawasan pada tahun n-1}} \times 100\%$	Rekomendasi Temuan BPK dan APIP Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi	Inspektur Pembantu
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan APIP	Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan Eksternal (BPKP, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten). Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi temuan hasil pengawasan pada tahun n-1}} \times 100\%$	Inspektorat Kabupaten	Inspektur Pembantu	
	Nilai Maturitas SPIP	Hasil evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh BPKP	Laporan hasil evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh BPKP	Inspektur Pembantu	
1.2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	Persentase capaian nilai MCP Kabupaten	Hasil penilaian MCP oleh KPK	Laporan hasil penilaian MCP oleh KPK	Inspektur Pembantu
1.3	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Inspektorat dalam	Tingkat Kapabilitas APIP	Hasil penilaian atas kapabilitas APIP oleh BPKP	Laporan hasil penilaian atas kapabilitas APIP dari BPKP	Inspektur Pembantu

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2 pelaksanaan tugas	3	4	5	6
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat

27. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, akuntabel dan berkelanjutan	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.1 Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program yang direncanakan didalam RKPD}}{\text{Jumlah program yang direncanakan didalam RPJMD}} \times 100\%$	RPJMD RKPD Laporan SIPD	Bidang I, Bidang II, Bidang III dan Bidang IV
		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program yang dianggarkan (APBD)}}{\text{Jumlah program yang direncanakan (RKPD)}} \times 100\%$	RKPD APBD Laporan SIPD	Bidang I, Bidang II, Bidang III dan Bidang IV
	1.2 Meningkatkan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	Persentase pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan	Rata-rata persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Rencana Strategis, Rencana Strategis dengan Rencana Kerja, RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan KUA PPAS	RPJMD Rencana Strategis Rencana Kerja RKPD Laporan SIPD	Bidang I, Bidang II, Bidang III dan Bidang IV

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	1.3 Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan	Persentase kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah kajian yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan}}{\text{Jumlah kajian yang tersusun}} \times 100\%$	Dokumen Kajian Penelitian	Bidang IV
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
28. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH					
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Laporan Hasil Opini BPK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	1.1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel	Persentase terhadap implementasi transaksi non tunai	Transaksi Non Tunai dilaporkan dari Perangkat Daerah setiap tanggal 10 dalam bulan berjalan. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah belanja transaksi non tunai}}{\text{Jumlah realisasi belanja}} \times 100\%$	Laporan Bulanan Non Tunai Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
		Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan penetapan dokumen penganggaran APBD	Jadwal penyusunan dan penetapan dokumen anggaran APBD	Bidang Anggaran
		Ketepatan waktu penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan	Usulan RKBMD dari masing-masing Perangkat Daerah dilaporkan setiap bulan Juni untuk ditetapkan sebagai Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Usulan RKBMD dan RKP	Bidang Aset

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Barang Milik Daerah	Kabupaten. Formula Perhitungan : Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)		
		Opini BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Laporan Hasil Opini BPK	Bidang Akuntansi
		Penyelesaian administrasi pengelolaan keuangan tepat waktu	Ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi pengelolaan keuangan daerah	Jadwal penyelesaian administrasi pengelolaan keuangan daerah	Sekretariat
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
29. BADAN PENDAPATAN DAERAH					
1	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	1.1 Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang Pendaftaran dan Penetapan Bidang Pengalihan dan Penulisan Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Pendapatan Daerah
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Badan Pendapatan daerah	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
30. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan ASN guna mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang profesional	Nilai Sistem Merit	Nilai atas penerapan sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara	Hasil penilaian atas penerapan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1.1 Meningkatkan kualitas manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	Penilaian Sistem Merit terdiri dari 8 Aspek, yaitu : Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; Sistem Informasi. Nilai atas penerapan sistem merit secara resmi dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.	Laporan Hasil penilaian atas penerapan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara	Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan, Cuti dan Pensiun PNS
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2.1 Meningkatnya	Nilai AKIP Badan Kepegawaian dan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh	Laporan hasil evaluasi atas AKIP	Sekretariat

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	akuntabilitas Kinerja	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inspektorat Daerah	perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	
31. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH					
1	Terwujudnya stabilitas daerah yang aman dan tertib	Jumlah konflik sosial	Jumlah konflik sosial pada tahun n	Data konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
1.1	Mewujudkan masyarakat yang Pancasilais	Persentase organisasi masyarakat yang dibentuk	$\frac{\text{Jumlah organisasi masyarakat yang dibentuk}}{\text{Jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar}} \times 100\%$	Data Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
		Cakupan pembinaan agama, kemasyarakatan dan ekonomi	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembinaan agama, kemasyarakatan dan ekonomi pada tahun n}}{\text{Jumlah kegiatan pembinaan agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang direncanakan pada tahun n}} \times 100\%$	Data Harga Sembako Data Ketersediaan Pangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
		Jumlah partai politik yang dibentuk	Jumlah partai politik yang dibentuk pada tahun n	KPU Data Partai Politik yang terdaftar	Bidang Politik Dalam Negeri
		Cakupan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada tahun n}}{\text{Jumlah kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang direncanakan pada tahun n}} \times 100\%$	Forum Pembauran Kebangsaan	Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	2.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP	Sekretariat

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Politik Daerah		perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	

32. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	Meningkatnya ketahanan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Bencana			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.1 Berkurangnya resiko bencana	Persentase desa tangguh bencana pada kawasan rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah desa tangguh bencana}}{\text{Jumlah desa rawan bencana}} \times 100\%$	Data Desa yang telah dibentuk Tim Siaga Bencana Desa Peta Kawasan Rawan Bencana Laporan Kejadian Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
---	--	------------	---	---	-------------------------------------

	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
--	--	--	---	---	-------------

33. KECAMATAN DENGAN WILAYAH KELURAHAN DAN DESA

1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan kawasan Perdesaan Meningkatnya Pemerataan Pembangunan kawasan Perdesaan	Tingkat Kemendirian Desa Desa Mandiri Desa Maju Desa Berkembang Desa Tertinggal Desa Sangat Tertinggal	Jumlah Desa berdasarkan dengan kategori desa pada tahun n	Data IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kecamatan
---	---	---	---	---	-----------

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	1.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Kemendirian Desa di Kecamatan Desa Mandiri Desa Maju Desa Berkembang Desa Tertinggal Desa Sangat Tertinggal	Jumlah Desa berdasarkan dengan kategori desa pada tahun n	Data IDM Kementerian Dese, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Seksi Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pelayanan Umum Seksi Kesejahteraan Masyarakat Seksi Satuan Polisi Pamong Praja
		Tingkat Kemajuan Kelurahan	Rata-rata capaian (Dasa Wisma Aktif +Karang taruna Aktif+Posyandu Aktif+LPM Aktif+Ketaatan Terhadap PBB+Penurunan Stunting)	Data Dasa Wisma Data Karang Taruna Data Posyandu Data LPM Data PBB Data Stunting	Seksi Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pelayanan Umum Seksi Kesejahteraan Masyarakat Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan publik	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik	Kecamatan
3	2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan di Kecamatan	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	Seksi Pelayanan Umum
	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan
	3.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah	Sekretariat

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				dari Inspektorat Daerah	
34. KECAMATAN DENGAN WILAYAH KELURAHAN					
1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan kawasan Perdesaan Meningkatkan Pemerataan Pembangunan kawasan Perdesaan	Tingkat Kemendirian Desa Desa Mandiri Desa Maju Desa Berkembang Desa Tertinggal Desa Sangat Tertinggal	Jumlah Desa berdasarkan dengan kategori desa pada tahun n	Data IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kecamatan
	1.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Kemajuan Kelurahan	Rata-rata capaian (Desa Wisma Aktif+Karang taruna Aktif+Posyandu Aktif+LPM Aktif+Ketaatan Terhadap PBB+Penurunan Stunting)	Data Desa Wisma Data Karang Taruna Data Posyandu Data LPM Data PBB Data Stunting	Seksi Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pelayanan Umum Seksi Kesejahteraan Masyarakat Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan publik	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik	Kecamatan
	2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan di Kecamatan	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	Seksi Pelayanan Umum
3	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi atas AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Kecamatan

NO	TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				Reformasi Birokrasi	
	3.1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah	Laporan hasil evaluasi atas AKIP perangkat daerah dari Inspektorat Daerah	Sekretariat


BUPATI ENDE
DJAFAH H. ACHMAD